

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

2022

PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 7 ;, LD 7 TAHUN 2022/9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2021

ABSTRAK

- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 Perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019 Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Lutim No.11 Tahun 2020; Perda Kab. Lutim No.12 Tahun 2021; Perda No.6 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling sedikit meliputi Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 18 agustus 2021
- Pernjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.